

TELISIK DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN

Esha Falahi Bastaria, Indarto, dan Aprih Santoso

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

aprihsantoso@usm.ac.id

Abstrak. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran dan menganalisis peran Monitoring (Pemantauan) dalam sebagai variable memoderasinya. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara purposive sampling dengan kriteria : 1) Pegawai berhubungan dengan proses perencanaan; 2) Pegawai menduduki jabatan yang berkaitan dengan Perbendaharaan; 3) Pegawai berhubungan dengan proses pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 80 responden. Temuan empiris telah membuktikan bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dan Monitoring tidak memoderasi secara signifikan Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penyerapan, Anggaran, Monitoring

Abstract. The study aims to analyze the influence of Budget Planning, Budget Execution, HR Competence on Budget Absorption and analyze the role of Monitoring in moderating variables. The technique in taking research samples using purposive sampling data collection techniques with the following criteria: 1) Employees are related to the planning process; 2) Employees occupy positions related to the Treasury; 3) Employees relate to the process of procuring Goods / Services at the Central Java Province Inspectorate. The sample in this study was 80 respondents. The findings have proven that Budget Planning, Budget Execution, HR Competency has a significant effect on Budget Absorption and Monitoring does not significantly influence the Effect of Budget Planning, Budget Execution, HR Competency to Budget Absorption

Keywords: Planning, Execution, Absorption, Budget Monitoring

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menurut Gagola *et al.* (2017). Penyerapan anggaran yang telah direncanakan dalam APBD juga menjadi alat ukur keberhasilan dari kinerja suatu pemerintahan, demikian Rozai dan Subagiyo (2015). Menurut BPKP (2014), ada dua macam sudut pandang tentang penyerapan anggaran, yaitu: (1) membandingkan anggaran dengan realisasi di akhir tahun. Contoh : anggaran Rp. 100.000.000,-. Pada akhir tahun, realisasi anggaran Rp. 91.000.000,- berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 91% (2) proporsionalitas persentase penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun, hal ini dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75% tetapi pada saat triwulan IV rata-rata penyerapan anggaran sudah lebih dari 90%.

Menurut PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, salah satu kriteria pemberian penghargaan kepadaKementerian/Lembaga berupa prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan, yaitu: capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya dengan persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%.

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2015), Penetapan Pola Penyerapan Ideal Berdasarkan Karakteristik Belanja dibagi menjadi 4 (empat) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran belanja. Triwulan I: penyerapan anggaran masih landai dan meningkat sedikit, yaitu sebesar 15% dikarenakan pada Triwulan I merupakan tahap persiapan. Barulah pada Triwulan II dan III penyerapan anggaran cenderung meningkat sampai puncaknya, yaitu masing-masing Triwulan sebesar 35% dikarenakan kegiatan sudah mulai direalisasikan. Triwulan IV penyerapan anggaran mulai menurun, yaitu sebesar 15% dikarenakan mayoritas pelaksanaan anggaran sudah direalisasikan pada Triwulan II dan Triwulan III.

Ketidaktercapaian target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien (BPKP, 2015). Keterlambatan realisasi anggaran yang menumpuk pada triwulan terakhir tahun anggaran berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Pemerintah hanya mengejar output kegiatan dan mengesampingkan kualitas dari output tersebut (Mutmaina dan Iqbal, 2017).

Sebagaimana hasil Laporan Pelaksanaan *Spending Performance* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014) bahwa tingkat penyerapan belanja daerah dipengaruhi proses perencanaan anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran satuan kerja yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran merupakan pola penyerapan anggaran yang kurang baik dilihat dari sisi perencanaan anggaran maupun manajemen kas (Rozai dan Subagiyo, 2015). Perencanaan melalui penyusunan program dan kegiatan yang memuat alokasi anggaran pada SKPD belum memberikan garansi kesesuaian pelaksanaan anggaran, menurut Papatungan dan Morasa (2017). Penelitian Sulaeman *et al.* (2017), Rozai dan Subagiyo (2015), Sinaga (2016), Gagola *et al.* (2017), Mutmainna dan Iqbal (2017), Sudarwati *et al.* (2017), membuktikan bahwa Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Sedangkan penelitian Seftianova dan Adam (2013) membuktikan bahwa Perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dalam pengelolaan keuangan setelah proses perencanaan anggaran, yaitu aktivitas realisasi semua rencana yang telah disusun dan ditetapkan, demikian Kementerian Keuangan (2014). Penundaan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan terhambatnya realisasi anggaran belanja (Sudarwati *et al.*, 2017). Penelitian Gagola *et al.* (2017), Sudarwati *et al.* (2017) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Sedangkan penelitian Mutmainna dan Iqbal (2017) membuktikan bahwa Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Kompetensi SDM merupakan kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Peraturan Pemerintah, 2000). Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana anggaran dalam satuan kerja yang memiliki tugas sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa harus memahami prosedur teknis Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian Sinaga (2016), Sudarwati *et al.* (2017), Mutmainna dan Iqbal (2017) membuktikan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Penelitian Rerung *et al.* (2017) membuktikan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Monitoring bertujuan mendapatkan *feed back* bagi kebutuhan kegiatan yang sedang berjalan dan mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksanaan kegiatan dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan *feed back* tersebut. Kesenjangan tersebut dapat mencakup faktor biaya, waktu, SDM, dan sebagainya Hindriani *et al.* (2012).

Pelaksanaan Monitoring diharapkan mampu menjadi faktor penguat dalam efektivitas penyerapan anggaran. Penelitian Hindriani *et al.* (2012), Hanafi dan Domai (2012) membuktikan bahwa pengendalian (berupa Monitoring) dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi

sehingga dapat segera dicari solusi untuk mengurangi risiko kegagalan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran satuan kerja yang cenderung rendah di awal tahun, menumpuk diakhir tahun, dan rendahnya akumulasi persentase penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran merupakan pola penyerapan anggaran yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan Pemerintah bahwa proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu dan lebih merata. Rozai dan Subagiyo (2015).

Fenomena ini juga terjadi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sebagai gambaran selama periode tahun anggaran 2014-2018, setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi. Hal ini terlihat dari data bahwa realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 2014 – 2018. Rata-rata penyerapan anggaran belanja langsung dari tahun 2014 – 2018 sebesar 91,95%. Akan tetapi, pada tahun 2016 terdapat anomali karena Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran tentang rasionalisasi anggaran. Anggaran Belanja Langsung Provinsi Jawa Tengah yang semula Rp.6.386.924.324.000,- menjadi Rp. 5.954.916.067.000,- atau berkurang Rp. 432.008.257.000,- (6,76%). Di Inspektorat sendiri anggaran belanja langsung yang semula Rp. 26.259.220.000,- menjadi Rp. 19.693.714.000,- atau berkurang Rp. 6.565.506.000,- (25%). Rasionalisasi dalam hal ini sebagai *leverage factor* dari rata-rata penyerapan anggaran tahun 2014–2018. Artinya, rata-rata penyerapan anggaran terdongkrak/nilainya naik akibat tingginya persentase penyerapan belanja langsung tahun 2016 (97%). Selain itu penyerapan anggaran belanja langsung pada Triwulan IV mengalami penumpukan. Ini ditandai dengan adanya rata-rata persentase penyerapan Triwulan IV tertinggi dibandingkan dengan Triwulan yang lain. Rendahnya penyerapan anggaran sampai Triwulan III menyebabkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengejar target di akhir tahun sehingga terjadi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Penumpukan seperti ini tentu bisa mengurangi kualitas belanja. Oleh sebab itu, untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran perlu dilakukan penelitian yang mendalam.

Penelitian mengenai penyerapan anggaran telah banyak dilakukan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan hasil pada tiap variabelnya sebagaimana disebutkan di atas. Hasil penelitian yang tidak konsisten inilah yang menjadi alasan untuk menguji kembali. Adanya senjangan temuan riset sebelumnya, menjadikan penelitian ini menarik untuk mengujinya kembali. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penyerapan Anggaran dan Untuk menganalisis peran Monitoring (Pemantauan) dalam memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penyerapan Anggaran.

Hubungan Logis Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Proses perencanaan dalam penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun tidak menemui hambatan sehingga penyerapan anggaran akan berjalan efektif dan tepat waktu. Penyusunan anggaran harus dilaksanakan dengan melakukan penelaahan kebutuhan organisasi dan kegiatan yang diajukan harus sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi. Penyusunan anggaran harus sinkron dengan jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Jadwal penyusunan anggaran dilaksanakan terlebih dahulu daripada penyusunan PKPT. Hal ini mengakibatkan adanya deviasi antara kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan di RKA, dengan kata lain ada beberapa kegiatan yang tidak terakomodasi dan ada kegiatan yang tidak dijalankan selama tahun anggaran berjalan sehingga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

Rencana penyerapan anggaran sebenarnya telah dicantumkan dalam DPA dan Rencana Kerja Operasional (RKO) tetapi terkadang hal tersebut hanya formalitas. Setiap pagu belanja berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi dengan dua belas bulan. Hal ini tidak

mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya, mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama, kecuali untuk pengeluaran tertentu misalnya belanja gaji. Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang terukur, akan menyebabkan satker tidak mempunyai pedoman yang tepat tentang kapan anggaran belanja seharusnya direalisasikan. Akibatnya, kegiatan akan terkonsentrasi pada akhir tahun dimana satker berusaha mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DPA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154, ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD, yaitu: 1) terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis bahwa persetujuan DPRD tentang peraturan daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jika pengesahan APBD Perubahan dilaksanakan sebelum bulan September, maka kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan dilaksanakan tidak terkonsentrasi pada triwulan IV.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman *et al.* (2017), Rozai dan Subagiyo (2015), dan Sinaga (2016) membuktikan bahwa perencanaan yang tidak matang berpengaruh pada kurang optimalnya penyerapan anggaran. Penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran dilakukan oleh Gagola *et al.* (2017), Mutmainna dan Iqbal (2017) dan Sudarwati *et al.* (2017) juga menghasilkan penelitian yang sama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dalam pengelolaan anggaran setelah proses perencanaan anggaran, yaitu aktivitas realisasi semua rencana yang telah disusun dan ditetapkan. Sehingga apabila perencanaan dilaksanakan dengan efektif dan terukur, maka akan tercipta pola penyerapan anggaran yang baik. Pelaksanaan Anggaran dimulai pada saat penyusunan SK Pengelola Keuangan. SK tersebut di lingkungan suatu instansi seharusnya ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran. Namun dalam pelaksanaannya, penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan keterlambatan pula pada pencairan anggaran pada Satker yang bersangkutan yang arahnya juga akan berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran. Pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja juga sering mengabaikan jadwal yang ada di dokumen RKO. Kurangnya kesiapan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran membuat jadwal pencairan dana dalam dokumen RKO tidak dijadikan panduan untuk melakukan penarikan dana. Hal tersebut mengakibatkan mundurnya jadwal kegiatan yang telah disusun sehingga menjadi efek domino pada pelaksanaan kegiatan lainnya yang akan bermuara pada penyerapan anggaran. Kelambatan / kegagalan pemenuhan berkas pengadaaan pada tahap pelaksanaan anggaran bisa mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan. Dan dapat disimpulkan bahwa akibatnya akan berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran. menurut Gagola *et al.* (2017), pelaksanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu semakin baik pelaksanaan anggaran maka penyerapan anggaran semakin tinggi.

Hal ini mempengaruhi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (*principal*). Hasil penelitian Sudarwati *et al.* (2017) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun adalah pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penyerapan Anggaran.

Kompetensi SDM merupakan kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien [12]. Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana anggaran dalam satuan kerja yang memiliki tugas sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa harus memahami prosedur teknis Pengadaan Barang / Jasa. Ketika kurangnya pemahaman utuh akan dasar hukum, peraturan, tata cara dan prosedur teknis pengadaan Barang/Jasa yang berada dalam wilayah kewenangannya mengakibatkan sikap ketakutan yang berlebihan dalam proses pengadaan. Sikap ketakutan akan menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sehingga terhambatnya pencairan anggaran. Keterbatasan aparat pemerintahan yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang / Jasa juga mengakibatkan Panitia pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap) jabatan dan proses pengadaan Barang / Jasa mengikuti ketersediaan waktu tim / panitia pengadaan Barang / Jasa sehingga mengalami keterlambatan penyerapan anggaran.

Penelitian yang memberikan hasil bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016), Sudarwati *et al.* (2017), dan Mutmainna dan Iqbal (2017). Hasil penelitian Sudarwati *et al.* (2017) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun adalah Sumber Daya Manusia. Penelitian Mutmainna dan Iqbal (2017) memberikan hasil bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Monitoring Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Perencanaan adalah siklus penting dalam penyusunan anggaran karena menentukan arah dalam pelaksanaan anggaran serta menentukan tercapai tidaknya sebuah sasaran dengan baik. Perencanaan anggaran yang tidak matang akan menyebabkan proses penyerapan belanja terhambat. Praktik rendahnya penyerapan anggaran pada akhir tahun dan penyerapan besar-besaran di triwulan akhir tahun tetap saja terjadi dari tahun ke tahun.

Monitoring Perencanaan Anggaran dilaksanakan pada saat penyusunan anggarandan penyusunan rencana penarikan anggaran selama tahun anggaran berkenaan. Monitoring pada saat penyusunan anggaran dilaksanakan dengan tujuan memastikan: 1) apakah dalam pengajuan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian pelaksana anggaran; 2) apakah tiap rekening dalam anggaran telah sesuai dengan harga pasar dan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan harga pada tahun pelaksanaan; 3) apakah tiap rekening anggaran telah sesuai dalam penetapan akun belanja. Pelaksanaan monitoring pada tahap perencanaan anggaran diharapkan mampu mengidentifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin sehingga tidak menghambat dalam proses pelaksanaan anggaran yang berakibat terhambatnya proses penyerapan anggaran. Teknik dalam pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan melalui kegiatan diskusi terbatas melalui *Forum Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh klarifikasi perencanaan program dan menyamakan persepsi melalui urun rembuk terhadap sebuah permasalahan atau substansi tertentu sehingga diperoleh satu kesamaan (*frame*) dalam melihat dan menyikapi hal-hal yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Monitoring memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Monitoring Memoderasi Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam hal penyerapan yang masih rendah, peran Monitoring dalam hubungannya dengan pelaksanaan anggaran, yaitu mengidentifikasi risiko dan permasalahan yang sekiranya bisa menghambat dalam pelaksanaan anggaran. Data capaian

anggaran harus dibandingkan secara terus menerus dengan sasaran yang ditetapkan sehingga selisih (deviasi) dan kendala yang dihadapi dapat dianalisis lebih lanjut untuk dicarikan solusi yang tepat. Teknik dalam pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) setiap bulan untuk memperoleh klarifikasi pelaksanaan program.

Penelitian Hindriani (2012) membuktikan bahwa pengendalian (berupa Monitoring) dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusi untuk mengurangi risiko kegagalan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Monitoring memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Monitoring memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran. Para pimpinan memberikan perhatian penting kepada ketersediaan kemampuan-kemampuan dan keahlian-keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam rangka terlaksananya suatu program atau kegiatan. Pelaksanaan monitoring terhadap SDM seharusnya dimulai sejak awal dalam pengelolaan anggaran yang mana mensyaratkan adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten, memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Monitoring SDM dilaksanakan dengan tujuan memastikan: 1) apakah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki pemahaman utuh akan dasar hukum, peraturan, tata cara dan prosedur teknis pengadaan Barang/Jasa sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam koridor rencana kegiatan yang disusun pada saat perencanaan; 2) tercukupinya jumlah aparat Pemerintah yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hal tersebut, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Monitoring memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran.

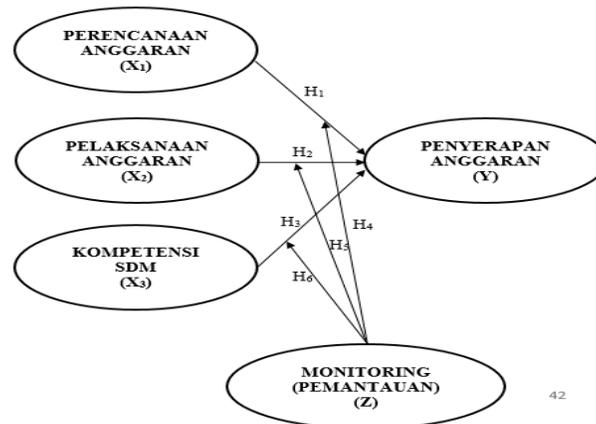
Kerangka Pemikiran Teoritis. Sebagaimana hasil Laporan Pelaksanaan *Spending Performance* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [16] bahwa tingkat penyerapan belanja daerah dipengaruhi proses perencanaan anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran satuan kerja yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran merupakan pola penyerapan anggaran yang kurang baik dilihat dari sisi perencanaan anggaran maupun manajemen kas. Perencanaan melalui penyusunan program dan kegiatan yang memuat alokasi anggaran pada SKPD belum memberikan garansi kesesuaian pelaksanaan anggaran (Sulaeman *et al.* (2017).

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dalam pengelolaan keuangan setelah proses perencanaan anggaran, yaitu aktivitas realisasi semua rencana yang telah disusun dan ditetapkan (BPKP, 2012). Penundaan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan terhambatnya realisasi anggaran belanja.

SDM sebagai pelaksana anggaran dalam satuan kerja yang memiliki tugas sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa harus memahami prosedur teknis Pengadaan Barang/Jasa. Ketika kurangnya pemahaman utuh akan dasar hukum, peraturan, tata cara dan prosedur teknis pengadaan Barang/Jasa yang berada dalam wilayah kewenangannya mengakibatkan sikap ketakutan yang berlebihan dalam proses pengadaan. Sikap ketakutan akan menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sehingga terhambatnya pencairan anggaran.

Monitoring bertujuan mendapatkan *feed back* bagi kebutuhan kegiatan yang sedang berjalan dan mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksanaan kegiatan dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan *feed back* tersebut. Kesenjangan tersebut dapat mencakup faktor biaya, waktu, SDM, dan sebagainya.

Pelaksanaan Monitoring diharapkan mampu menjadi faktor penguat dalam efektivitas penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam konteks model empirik pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian dimulai dengan adanya masalah dan membangun kerangka pemikiran sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 131 pegawai. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling* sejumlah 80 responden.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Penyerapan Anggaran, dengan indikator : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Persentase penyerapan anggaran, Peringkat Persentase Penyerapan Anggaran dan empat variabel independen: (a) dengan indikator : Penyusunan anggaran dengan penelaahan kebutuhan organisasi, Formalisasi penyusunan RKO, penetapan APBD Perubahan, (b) Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator : Penetapan SK pejabat pengelola keuangan, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan jadwal RKO, Proses penyelesaian pengadaan Barang/Jasa. (c) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator : Pemahaman peraturan, Keengganan menjadi pejabat pengadaan, Persentase kelulusan pada ujian sertifikasi Pengadaan B/J. 2) dan Rangkap Tugas/Jabatan. serta variabel moderasi yaitu Monitoring (Pemantauan) dengan indikator : Klarifikasi perencanaan kegiatan untuk menyamakan persepsi, Ketepatan tingkat capaian dari pelaksanaan kegiatan dan Kesesuaian antara jumlah SDM yang kompeten dengan beban kerja yang ditanggung .

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) yang dioperasikan dengan program *Smart PLS 3.0*. Ada dua tahap dalam evaluasi model dalam PLS, yaitu: (a) Evaluasi *Outer Model* atau Model Pengukuran atau *Measurement Model*. Nilai signifikan dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping yang juga menghasilkan nilai *t*. Kriterianya: *Path Coeficient* dengan *t* statistik $\geq 1,96$ atau memiliki *P Value* $\leq 0,05$ dinyatakan signifikan. (2) Evaluasi Nilai R^2 : Interpretasi nilai R^2 adalah besarnya persentase variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen. Kriteria nilai R^2 terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu: 0,67 (Substansial), 0,33 (sedang / moderat), dan 0,19 (lemah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model (Model Pengukuran atau *Measurement Model*)

Model pengukuran untuk uji validitas *convergent validity* dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai dengan cara:

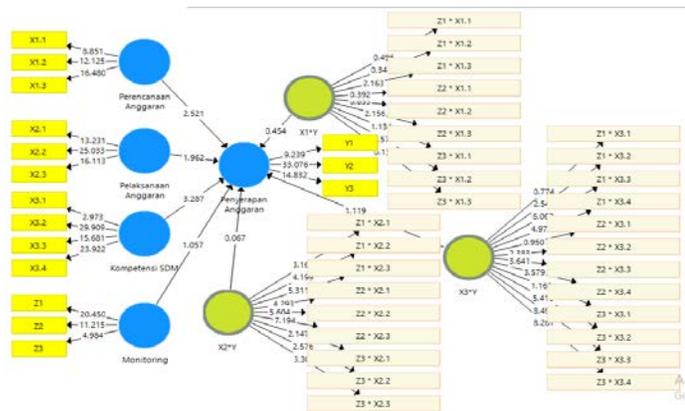
- 1) Melihat nilai *Loading Factor* (LF) untuk masing-masing indikator. LF menggambarkan besarnya korelasi antara setiap indikator dan konstruksinya. Nilai $LF \geq 0,7$ dikatakan ideal, artinya indikator tersebut valid mengukur variabel yang dibentuknya. Dalam pengalaman empiris penelitian, sebagian ahli mentolerir Nilai $LF > 0,4$. Dengan demikian, nilai $LF \leq 0,4$ harus dikeluarkan dari model. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel dengan jumlah indikator 16 dengan rincian 3 indikator untuk Perencanaan Anggaran, 3 indikator untuk Pelaksanaan Anggaran, 4 indikator untuk Kompetensi SDM, 3 indikator Penyerapan Anggaran, dan 3 indikator Monitoring. Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran diperoleh nilai LF untuk semua indikator dinyatakan valid mengukur variabel yang dibentuknya.
- 2) Mengukur validitas menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE menggambarkan besarnya varian yang dimiliki oleh variabel. Semakin besar varian semakin besar representasi variabel manifest terhadap variabel latennya. Nilai $AVE \geq 0,5$ menunjukkan *convergent validity* yang baik artinya variabel dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari indikatornya. diketahui bahwa variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM, Penyerapan Anggaran, dan Monitoring menunjukkan bahwa nilai AVE di atas 0,5, artinya variabel dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari indikatornya, sehingga nilainya menunjukkan *convergent validity* yang baik.
- 3) Menguji Reliabilitas dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). Nilai *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk atau variabel laten dengan kriteria nilai di atas 0,7. *Composite Reliability* menunjukkan nilai konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur konstruksinya dengan kriteria nilai di atas 0,6. Hasil pengujian diketahui bahwa variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM, Penyerapan Anggaran, dan Monitoring memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7 dan *Composite Reliability* lebih dari 0,6 sehingga seluruh indikator reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruksinya.

Nilai *cross loading* adalah membandingkan korelasi indikator dengan variabelnya dan variabel dari blok lain. Bila korelasi antara indikator dengan variabelnya lebih tinggi dari korelasi dengan variabel lainnya, menunjukkan bahwa variabel tersebut memprediksi pada blok mereka lebih baik dari blok lainnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa semua indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstruksinya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator dalam blok adalah penyusun konstruk dalam kolom tersebut.

Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan akar AVE dengan korelasi antar konstruk, Berdasarkan dijelaskan bahwa Akar AVE untuk konstruk Penyerapan Anggaran adalah 0,804, sedangkan korelasi secara maksimal Penyerapan Anggaran dengan konstruk lainnya adalah 0,750 sehingga nilai akar AVE Penyerapan Anggaran lebih besar dari nilai korelasi konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa syarat *discriminant validity* lainnya terpenuhi. Begitu juga dengan konstruk lainnya yang menunjukkan akar AVE lebih besar dari korelasi konstruk.

2. Evaluasi *InnerModel* atau Model Struktural

Pada tahap evaluasi model struktural akan dianalisis dengan melihat signifikansi hubungan antar konstruk yang ditunjukkan oleh nilai t statistik yang dihasilkan dari output dari Option Calculate PLS → Bootstrapping.



Gambar 2. Tampilan Output Inner atau Model Struktural

(a) Evaluasi Nilai R²

Interpretasi nilai R² adalah besarnya persentase variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen. Kriteria nilai R² terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu: 0,67 (Substansial), 0,33 (sedang/moderat), dan 0,19 (lemah).

Nilai R Square sebesar 0,735 termasuk dalam klasifikasi substansial. Hal ini berarti sebesar 73,5% variasi model PLS penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen (Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Kompetensi SDM) dan variabel moderasi (Monitoring), sedangkan sisanya 26,5% (100%-73,5%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar model penelitian.

(b) Koefisien Jalur (Path Coefficient)

Koefisien Jalur menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel dan melihat signifikansi hubungan antar variabel. Nilai signifikan dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping yang juga menghasilkan nilai t. Kriterianya: Path Coefficient dengan t statistik ≥ 1,96 atau memiliki P Value < 0,05 dinyatakan signifikan.

Tabel 1. Path Coefficient

Diagram Jalur	Original Sampel (O)	Mean Sampel (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Value
Perencanaan Anggaran → Penyerapan Anggaran	0,315	0,354	0,109	2,886	0,005
Pelaksanaan Anggaran → Penyerapan Anggaran	0,337	0,269	0,164	2,052	0,044
Kompetensi SDM → Penyerapan Anggaran	0,350	0,321	0,111	3,141	0,003
Monitoring → Penyerapan Anggaran	-0,106	-0,072	0,104	1,014	0,314
Perencanaan Anggaran Monitoring → Penyerapan Anggaran	0,075	0,006	0,140	0,536	0,593
Pelaksanaan Anggaran Monitoring → Penyerapan Anggaran	-0,009	0,054	0,151	0,060	0,953
Kompetensi SDM Monitoring → Penyerapan Anggaran	0,131	0,144	0,118	1,110	0,271

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Pengujian dengan bootstrapping juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel Perencanaan Anggaran mempunyai $T \text{ hitung} = 2,886 > 1,96$ dan menunjukkan nilai positif sebesar 0,407. Makna dari hasil tersebut adalah bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran dapat diterima.
- 2) Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel Pelaksanaan Anggaran mempunyai $T \text{ hitung} = 2,052 > 1,96$, signifikansi $0,044 < 0,05$, dan menunjukkan nilai positif sebesar 0,337. Makna dari hasil tersebut adalah bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 yang menyatakan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran dapat diterima.
- 3) Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai $T \text{ hitung} = 3,141 > 1,96$, signifikansi $0,003 > 0,05$, dan menunjukkan nilai positif sebesar 0,350. Makna dari hasil tersebut adalah bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran dapat diterima.
- 4) Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1 diketahui bahwa Monitoring memoderasi pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran mempunyai $T \text{ hitung} = 0,536 < 1,96$ dan signifikansi $0,593 > 0,05$. Makna dari hasil tersebut adalah bahwa variabel Monitoring tidak memoderasi secara signifikan pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Monitoring memoderasi pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran tidak dapat diterima.
- 5) Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1 diketahui bahwa Monitoring memoderasi pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran mempunyai $T \text{ hitung} = 0,060 < 1,96$ dan signifikansi $0,953 > 0,05$. Makna dari hasil tersebut adalah bahwa Monitoring tidak memoderasi secara signifikan pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa Monitoring memoderasi pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran tidak dapat diterima.
- 6) Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1 diketahui bahwa Monitoring memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran mempunyai $T \text{ hitung} = 1,110 < 1,96$ dan signifikansi $0,271 > 0,05$. Makna dari hasil tersebut adalah bahwa Monitoring tidak memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa Monitoring memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran tidak dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil pengujian pengaruh variabel Perencanaan Anggaran terhadap variabel Penyerapan Anggaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Berdasarkan tabulasi jawaban responden untuk variabel Perencanaan Anggaran menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi bahwa penyusunan anggaran masih dilaksanakan tanpa melakukan penelaahan kebutuhan organisasi dan kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi, yaitu sebesar 55,4. Penyusunan anggaran harus sinkron dengan jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Ketika penyusunan anggaran dilaksanakan terlebih dahulu daripada penyusunan PKPT akan mengakibatkan adanya deviasi antara kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan di RKA. Dengan kata lain, ada beberapa kegiatan yang tidak terakomodasi dan ada

kegiatan yang tidak dijalankan selama tahun anggaran berjalan sehingga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

Indikator lain yang dijawab oleh responden pada kuesioner yang diberikan yang mendapat nilai indeks sebesar 55,4, yaitu pada pernyataan Rencana Kerja Operasional (RKO) mayoritas kegiatan hanya dibagi dua belas bulan. Rencana penyerapan anggaran yang dicantumkan dalam dokumen RKO hanya formalitas saja. Hal ini tidak mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama. Jika tidak ada rencana penyerapan anggaran yang terukur, akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak mempunyai pedoman yang tepat mengenai kapan anggaran belanja seharusnya direalisasikan sehingga berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.

Indikator ketiga mendapat nilai indeks sebesar 54,4, yaitu jawaban kuesioner atas pernyataan keterlambatan pengesahan APBD Perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis bahwa persetujuan DPRD tentang Perda APBD Perubahan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jika pengesahan APBD Perubahan dilaksanakan pada saat terakhir, yaitu Bulan September, maka kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan baru akan dilaksanakan pada Bulan Oktober. Akibatnya, penyerapan akan terhambat dan menyebabkan terkonsentrasinya penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating dilakukan oleh Gagola *et al.* (2017), Mutmainna dan Iqbal (2017), dan Sudarwati *et al* (2017) juga menghasilkan penelitian yang sama. Proses perencanaan dalam penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan proram kegiatan yang telah disusun tidak menemui hambatan sehingga penyerapan anggaran akan berjalan efektif dan tepat waktu.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil pengujian pengaruh variabel Pelaksanaan Anggaran terhadap variabel Penyerapan Anggaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Berdasarkan tabulasi jawaban responden untuk variabel Pelaksanaan Anggaran menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi bahwa masih adanya keterlambatan penetapan SK Pejabat Pengelola Keuangan, yaitu sebesar 56. Surat Keputusan tersebut di lingkungan suatu instansi seharusnya ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran. Namun dalam pelaksanaannya, penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan keterlambatan pula pada pencairan anggaran pada Satker yang bersangkutan yang arahnya juga akan berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran.

Indikator lain yang dijawab oleh responden pada kuesioner yang diberikan yang mendapat nilai indeks sebesar 55, yaitu pada pernyataan Pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja sering mengabaikan jadwal yang ada di dokumen RKO. Kurangnya kesiapan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran membuat jadwal pencairan dana dalam dokumen RKO tidak dijadikan panduan bagi Inspektorat untuk melakukan penarikan dana. Hal tersebut mengakibatkan mundurnya jadwal kegiatan yang telah disusun sehingga menjadi efek domino pada pelaksanaan kegiatan lainnya yang akan bermuara pada penyerapan anggaran. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebaiknya melakukan persiapan awal sebelum berjalannya tahun anggaran, seperti pelaksanaan kegiatan yang memerlukan periode yang lama dalam penyelesaiannya.

Indikator ketiga mendapat nilai rata-rata sebesar 53,8, yaitu jawaban kuesioner atas pernyataan Berkas Pengadaan yang kurang lengkap dalam proses penarikan dana. Kelambatan/kegagalan pemenuhan berkas pengadaan pada tahap pelaksanaan anggaran bisa mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan. Adanya

verifikasi berkas pengadaan sebelum dikirim ke BPKAD diperlukan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gagola *et al.* (2017), yaitu Pelaksanaan Anggaran mempengaruhi Penyerapan Anggaran sesuai dengan teori *agency*, yaitu semakin baik pelaksanaan anggaran maka penyerapan anggaran semakin tinggi. Hal ini mempengaruhi Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai *agent* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (*principal*). Hasil penelitian Sudarwati *et al.* (2017) juga menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun adalah Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dalam pengelolaan anggaran setelah proses perencanaan anggaran, yaitu aktivitas realisasi semua rencana yang telah disusun dan ditetapkan. Sehingga apabila perencanaan dilaksanakan dengan efektif dan terukur, maka akan tercipta pola penyerapan anggaran yang baik.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil pengujian pengaruh variabel Kompetensi SDM terhadap variabel Penyerapan Anggaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel Kompetensi SDM, responden menyatakan bahwa: 1) aparaturnya pelaksana pengadaan kurang memahami dasar hukum, peraturan, tata cara, dan prosedur teknis pengadaan B/J sebesar 53,2; 2) adanya keengganan menjadi Pejabat Pengadaan karena tidak ada keseimbangan risiko pekerjaan dan imbalan yang diterima sebesar 55; 3) Tingkat kelulusan yang rendah pada ujian sertifikasi sebesar 53,8; dan 4) adanya rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya sebesar 54,2.

Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana anggaran dalam satuan kerja yang memiliki tugas sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa harus memahami prosedur teknis Pengadaan Barang/Jasa. Ketika kurangnya pemahaman itu akan dasar hukum, peraturan, tata cara dan prosedur teknis pengadaan Barang/Jasa yang berada dalam wilayah kewenangannya mengakibatkan sikap ketakutan yang berlebihan dalam proses pengadaan. Sikap ketakutan akan menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sehingga terhambatnya pencairan anggaran. Keterbatasan aparat pemerintahan yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang/Jasa juga mengakibatkan Panitia pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap) jabatan dan proses pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketersediaan waktu tim/panitia pengadaan Barang/Jasa sehingga mengalami keterlambatan penyerapan anggaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarwati *et al.* (2017), dan Mutmainna dan Iqbal (2017). Hasil penelitian Sudarwati *et al.* (2017) juga menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun adalah Sumber Daya Manusia. Penelitian Mutmainna dan Iqbal (2017) memberikan hasil bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Monitoring Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil pengujian Monitoring sebagai variabel yang memoderasi pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Monitoring memoderasi tidak secara signifikan pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Monitoring Perencanaan Anggaran dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran dan penyusunan rencana penarikan anggaran selama tahun anggaran berkenaan. Teknik dalam pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan melalui kegiatan diskusi terbatas melalui *Forum Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh klarifikasi perencanaan program dan menyamakan persepsi melalui urun rembuk terhadap sebuah permasalahan atau substansi tertentu sehingga diperoleh satu kesamaan (*frame*) dalam melihat dan menyikapi hal-hal yang dimaksud.

Akan tetapi kegiatan FGD tersebut belum meliputi seluruh bagian yang ada di lingkungan Satker karena Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun sekitar akhir tahun sedangkan penyusunan anggaran yang diawali oleh penyusunan Rencana Kerja dimulai sekitar Bulan Februari sehingga anggaran disusun kurang mewakili kebutuhan organisasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Monitoring tidak memoderasi secara signifikan pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Monitoring Memoderasi Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Hasil pengujian Monitoring sebagai variabel yang memoderasi pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Monitoring tidak memoderasi secara signifikan pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam hal penyerapan yang masih rendah, peran Monitoring dalam hubungannya dengan pelaksanaan anggaran, yaitu mengidentifikasi risiko dan permasalahan yang sekiranya bisa menghambat dalam pelaksanaan anggaran.

Teknik dalam pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) setiap bulan untuk memperoleh klarifikasi pelaksanaan program. Data capaian anggaran harus dibandingkan secara terus menerus dengan sasaran yang ditetapkan sehingga selisih (deviasi) dan kendala yang dihadapi dapat dianalisis lebih lanjut. Akan tetapi pembahasan dalam Rakor POK hanya sebatas alasan mengapa suatu kegiatan mengalami penundaan dan tidak sesuai jadwal tanpadicarikan bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Monitoring tidak memoderasi secara signifikan pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Hal penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindriani (2012) yang membuktikan bahwa pengendalian (berupa Monitoring) dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusi untuk mengurangi risiko kegagalan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran.

Monitoring Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran.

Hasil pengujian Monitoring sebagai variabel yang memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Monitoring tidak memoderasi secara signifikan pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran. Teknik dalam pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan melalui analisis beban kerja dengan tujuan memberi penegasan mengenai tanggung jawab dan uraian jabatan sehingga terjadi kesesuaian jumlah dan kualitas pegawai yang ada di suatu Satker. Meskipun hasil dari analisis beban kerja yang ada tersusun secara sistematis namun setelah dilakukan penelaahan ulang terdapat beberapa data yang tidak sesuai antara form yang selanjutnya. Jika hasil yang didapat dari analisis beban kerja belum dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh pada penataan SDM yang ada di Satker. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel monitoring bukan merupakan variabel moderating karena tidak memperkuat hubungan antara pengaruh kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa : a) Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. b) Monitoring tidak memoderasi secara signifikan Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: (1) Penelitian ini menghasilkan nilai R Square sebesar 0,735. Hal ini menunjukkan selain variabel yang telah digunakan dalam penelitian, masih ada sebesar 26,5% variabel lain yang diduga mampu digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran. (2) Nilai T Statistik yang rendah menunjukkan Variabel Monitoring tidak cukup untuk memoderasi Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran. (3) Ada 2 indikator dengan nilai *loading factor* yang tergolong rendah, yaitu indikator pada variabel Kompetensi SDM dan variabel Monitoring.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Manajemen Pemerintahan Daerah. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2014.
- Gagola, Ledy S, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*. Vol 8(1), 108-117.
- Hindriani, Nuning, Imam Hanafi dan Tjahjanulin Domai. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol 15 (3), 1-9
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Pelaksanaan Spending Performance Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Strategi Optimalisasi Belanja Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Peran Bendahara Umum Negara dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran. 2015.
- Mutmainna dan M. Iqbal. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol 7 (1), 120-132.
- Paputungan, Amna, Ventje Ilat dan Jenny Morasa. Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*. 2017. Vol 8(1), 247-256.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277 Tahun 2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas. 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 2000.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 2011.
- Rerung, Elypaz Donald, Herman Karamoy dan Winston Pontoh. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*. Vol 8(2), 192-202
- Rozai, Muhrom Ali dan Lilik Subagiyo. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2015. Vol 9 (1), 72-89
- Seftianova, Ratih dan Helmy Adam. 2013. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol 4 (1), 75-84.
- Sinaga, Edward James. 2016. Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal RechtsVinding*. Vol 5 (2), 261-274

- Sudarwati, Nina, Herman Karamoy dan Winston Pontoh. 2017. Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*. Vol 8(1), 129-138
- Sulaeman, Agung Sunarya, Andy Prasetiawan Hamzah dan Rame Priyanto. 2017. Penyerapan Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*. Vol 4 (20).